

IMPLIKASI PENANGANAN MASALAH *COMFORT WOMEN* TERHADAP HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN PADA TAHUN 2015-2019

THE IMPACT OF RESOLVING COMFORT WOMEN ISSUE TO JAPAN AND SOUTH KOREA RELATIONS DURING 2015 - 2019

Jeniffer Gracellia

Universitas Pelita Harapan, Tangerang
e-mail: jeniffer.gracellia@gmail.com

Abstract

The issue of comfort women that has occurred since 1932 continues to impact bilateral relations between Japan and South Korea. Various efforts have been made by two countries to deal with this issue, one of which is the agreement in 2015 that stating the comfort women issue has been completed and this agreement cannot be canceled. Instead of solving the problem, this agreement marked as the beginning of a worsening relation between the two countries. Poor relations led to several implications which then became a new problem to Japan and South Korea relations. This research finds that the comfort women issue has given three implications for the relations between Japan and South Korea. First is the Japan-South Korea Trade War in 2019, second is the withdrawal of South Korea from General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and the last is the boycott of Japanese products conducted by South Korean society. The unresolved issue has affected the economy, national security and the social life of the people of both countries.

Keywords: Comfort Women, Japan, South Korea, Bilateral Relations, Human Rights.

Abstrak

Permasalahan *comfort women* yang terjadi sejak tahun 1932 terus memberikan implikasi yang kuat kepada hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh kedua negara untuk menangani permasalahan ini, dimana salah satunya adalah perjanjian pada tahun 2015 yang menyatakan permasalahan *comfort women* telah selesai dan perjanjian ini tidak dapat dibatalkan. Bukannya menyelesaikan masalah, perjanjian ini menjadi awal dari hubungan kedua negara yang semakin memburuk. Hubungan yang buruk kemudian menimbulkan beberapa implikasi yang menjadi masalah baru di dalam hubungan Jepang dengan Korea Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa permasalahan *comfort women* memberikan tiga implikasi kepada hubungan Jepang dan Korea Selatan yaitu Perang Dagang Jepang-Korea Selatan 2019, penarikan Korea Selatan dari General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) dan pemboikotan produk Jepang yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan. Permasalahan *comfort women* yang tidak kunjung terselesaikan telah mempengaruhi perekonomian, keamanan nasional, hingga kehidupan sosial masyarakat kedua negara.

Kata Kunci: Comfort Women, Jepang, Korea Selatan, Hubungan Bilateral, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Comfort women merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk kelompok wanita yang terlibat dalam perekrutan secara paksa untuk menjadi pekerja seks bagi tentara Jepang. Kelompok *comfort women* ini ditempatkan di *comfort stations* atau rumah bordil yang didirikan oleh Jepang kepada tentaranya di beberapa wilayah iaiahannya

ketika Perang Asia Pasifik berlangsung. Menurut Yoshiaki Yoshimi yang merupakan peneliti yang pertama kali mengkaji *comfort women*, korban *comfort women* berjumlah sekitar 50.000-200.000 orang (Coomaraswamy, 1996) *Comfort women* tersebut ditempatkan pertama di rumah bordil di Shanghai pada 1937

Isu *comfort women* muncul kembali setelah Perang Dunia II dimulai dari mantan *comfort women* dari Korea, Kim Hak-sun muncul pertama kali pada tahun Agustus 1991. (Digital Museum the Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund, 2000). Kim menjadi korban pertama yang memberikan testimoni dan membuat permasalahan *comfort women* ini mendapatkan perhatian masyarakat.

Upaya rekonsiliasi sulit dilakukan dengan adanya perbedaan sudut pandang antara kedua negara. Menurut Jepang, pembangunan rumah bordil untuk *comfort women* dimaksudkan agar pemerintah dapat mengawasi dan mengatur penyebaran penyakit kelamin. Pemerintah Jepang juga menyatakan bahwa para wanita tersebut memberikan jasanya tanpa ada paksaan dan kekerasan. Walaupun begitu, di sisi Korea Selatan banyak korban yang bermunculan dan memberikan testimoni bahwa mereka telah mengalami kekerasan dan menjadi budak seks untuk tentara Jepang di wilayah perang.

Berbagai upaya dilakukan oleh Jepang untuk menjawab tuntutan pertanggungjawaban dari Korea Selatan. Upaya tersebut antara lain seperti *Kono Statement* yang merupakan pernyataan bahwa pemerintah Jepang mengakui bahwa militer Jepang pada saat Perang Dunia 2 terlibat dalam pengelolaan rumah bordil dan para wanita yang direkrut menjadi *comfort women* hidup dalam kesengsaraan dan memberikan jasanya dengan terpaksa (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1993), kemudian berbagai permintaan maaf dari pejabat pemerintah Jepang tetapi tidak pernah menyebutkan secara khusus mengenai *comfort women*.

Setelah naik turunnya hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan dikarenakan masalah ini, akhirnya kedua negara melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan *comfort*

Kesepakatan itu berisi permintaan maaf secara resmi yang disampaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan pemerintah Jepang akan membayar 8,5 juta dollar Amerika Serikat atau Rp 121 Miliar untuk mendirikan yayasan khusus untuk korban dan keluarga korban *comfort women* (Ministry Foreign Affairs of Japan, 2015). Pemerintah Jepang juga menginginkan patung *comfort women* di depan kantor kedutaannya disingkirkan.

Walaupun telah mencapai kesepakatan, perjanjian ini secara luas dikeduk oleh korban *comfort women* dan kelompok pendukungnya. Mereka berpendapat bahwa perjanjian ini gagal melibatkan suara dari para korban dan gagal memenuhi tuntutan dari para korban (United Nations Human Rights Bodies, 2013). Hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan terus mengalami ketegangan walaupun perjanjian mengenai *comfort women* telah dilakukan pada tahun 2015. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana permasalahan *comfort women* yang terjadi pada Perang Dunia II berimplikasi terhadap hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang.

Terdapat tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana permasalahan *comfort women* yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia II?; Bagaimana hubungan Jepang dalam penanganan masalah *comfort women*?; dan Bagaimana implikasi penanganan masalah *comfort women* terhadap hubungan Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2015-2019?

Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai permasalahan *comfort women* di Korea Selatan. Dari tinjauan tersebut, penulis menemukan alasan munculnya praktik *comfort women* adalah dikarenakan kerap terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh

jajahannya (Lee, S., 2014). Militer Jepang kemudian tertular penyakit kelamin yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam berperang. Oleh karena ini, pemerintah dan militer Jepang mulai merekrut para wanita yang secara khusus bekerja di *comfort stations* untuk para personel militer Jepang.

Penulis juga menemukan alasan permasalahan *comfort women* ditinggalkan setelah Perang Dunia II dikarenakan para mantan *comfort women* yang mengalami diskriminasi, sehingga tidak berani untuk menuntut atau menceritakan pengalamannya ke publik (Jonsson, G., 2015). Para korban kemudian menarik diri dan takut akan pengucilan dari masyarakat.

Permasalahan *comfort women* menarik perhatian masyarakat luas dikarenakan peran kuat dari organisasi masyarakat transnasional yang terus menekan pemerintah Jepang. Organisasi tersebut salah satunya adalah *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery* yang dibentuk pada tahun 1990 dan memegang peran kunci dalam membentuk dan memperkuat gerakan transnasional (Kun, Y., 2015). Organisasi ini membawa masalah ini ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan *Asia Solidary Conference* pada tahun 1992.

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Konstruktivisme. Dijelaskan oleh Aleksius Jemadu bahwa teori ini merupakan sebuah teori hubungan internasional yang sangat menakutkan kepada peranan ide atau pemikiran yang mengikat yang merupakan hasil konstruksi bersama dan tidak ada paksaan oleh orang lain dari luar (Aleksius Jemadu, 2017). Robert Jackson dan Georg Sorensen menjelaskan bahwa hubungan internasional menurut teori ini diciptakan dan dibentuk sepenuhnya oleh orang-orang yang menjadi pengambil keputusan dan setiap kegiatan dan unsur sosial dari

mempengaruhi hubungan internasional tersebut.

Teori ini dipilih sebagai teori yang menjelaskan bagaimana hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh unsur sosial dari para pengambil keputusan, dimana unsur sosial tersebut merupakan permasalahan *comfort women yang* telah menjadi batu sandungan dalam hubungan bilateral. Selain teori konstruktivisme, penulis juga menggunakan konsep *comfort women*, konsep Hak Asasi Manusia, konsep hubungan bilateral dan konsep kebijakan luar negeri dalam meneliti penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penulis menggunakan jenis data berbentuk kalimat dimana penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu studi daring dan studi kepustakaan. Studi daring dilakukan untuk mendapatkan data seperti jurnal penelitian, berita, situs resmi negara dan laporan resmi negara. Untuk studi kepustakaan dikumpulkan dari buku berbasis penelitian, koran dan jurnal cetak.

Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan teknik analisis naratif. Analisis naratif adalah teknik yang meneliti dan menganalisis data kualitatif dari bentuk narasinya dari kisah kehidupan individu dan peristiwa historis untuk fokus pada peristiwa dan koneksi diantara kejadian tersebut (W. Lawrence Neuman, 2013). Penulis kemudian menggunakan cara *path dependency* yang menjelaskan bagaimana sebuah kejadian dalam satu periode dapat membatasi opsi dan membentuk sebuah pilihan di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Dimulai pada tahun 1932 hingga berakhirnya Perang Dunia 2, pemerintah Jepang melalui tentara Kekaisaran Jepang telah merekrut dengan paksa 200.000 wanita ke dalam perbudakan seksual dan ditempatkan di

comfort stations (McDougall G.J, 1998). Wanita yang direkrut oleh militer Jepang berkisar umur 11 hingga 20 tahun, khususnya wanita yang tinggal di daerah atau negara yang dijajah Jepang selama Perang Dunia 1 dan 2. Pendirian *comfort station* pertama berada di Shanghai pada tahun 1932, menyusul *the January 28 Incident* yang merupakan peperangan antara Kekaisaran Jepang dengan Republik Tiongkok. Keberadaan *comfort stations* pertama di Shanghai juga diakui dalam penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Alasan dibentuknya *comfort stations* adalah untuk mencegah sentimen anti-Jepang sebagai akibat dari kerap terjadinya pemerkosaan, kekerasan hingga pembunuhan oleh personil militer Jepang kepada penduduk lokal di daerah yang ditempati saat itu.

Dari ratusan testimoni yang diberikan oleh korban *comfort women*, penulis mengambil tiga testimoni dari Korea Selatan yaitu dari Kim Bok-dong, Woo Yun Jae dan Yun Sooman (Asian Boss, 2018). Dari ketiga testimoni tersebut, terdapat kesamaan yaitu para wanita tersebut direkrut tanpa persetujuan dari dirinya sehingga masalah ini bukanlah masalah prostitusi, tetapi perbudakan seksual. Para wanita tersebut dipaksa untuk melayani 20 hingga 30 personil militer. Bukan hanya dipaksa, mereka juga mengalami kekerasan hingga mengalami kematian, cacat fisik hingga cacat psikologi. Dalam proses perekrutan juga diceritakan bagaimana otoritas lokal bekerja sama dengan militer Jepang untuk merekrut para wanita secara pasif.

Permasalahan *comfort women* merupakan sebuah pelanggaran HAM dimana praktik ini melanggar hak untuk hidup dimana para korban hidupnya terancam, ditempatkan dalam bahaya dan terpengaruhi masa depannya oleh militer Jepang. Selain itu, para korban juga menjadi budak seks dimana perbudakan merupakan sebuah pelanggaran HAM. Para korban juga mengalami

berada di *comfort women* sebagaimana dinyatakan dalam testimoni para korban *comfort women*.

Selain pelanggaran HAM, permasalahan ini juga melanggar hukum kebiasaan internasional yang telah dianggap sebagai *jus cogens* oleh negara-negara di dunia bahkan sebelum praktik ini dimulai, dimana salah satunya adalah larangan perbudakan, pemerkosaan dan penganiayaan dalam perang (McDougall G.J, 1998).

Jepang juga telah meratifikasi dua hukum internasional yang mengikat dan mengharuskan pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab dalam permasalahan ini, yaitu *the International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic* pada 1910 dan *International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children* pada 1921 (Etsuro. T, 2013). Kedua perjanjian yang telah diratifikasi ini melarang perbudakan dan perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak. Sebagai negara yang telah meratifikasi, Jepang memiliki kewajiban untuk menghukum para pelaku kejahatan yang berperan dalam proses perekrutan, perbudakan seksual hingga pelaku yang memiliki otoritas untuk menyetujui praktik *comfort women* (International Commission of Jurist, 1994).

Dalam teori konstruktivisme, dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara, unsur sosial dari pengambil keputusan akan mempengaruhi kebijakan tersebut. Unsur sosial tersebut antara lain seperti budaya, norma, kepercayaan, ide, dan lain lain. Permasalahan *comfort women* yang tidak terselesaikan hingga sekarang membuat masalah ini berkembang menjadi sebuah norma yang dipegang oleh masyarakat dari kedua negara. Norma tersebut mempengaruhi kebijakan yang diambil

Selain norma, penentu kebijakan yang diambil oleh kedua negara adalah identitas nasional. Teori konstruktivisme melihat bahwa identitas nasional sebuah negara tidak didasari oleh kekuatan material, tetapi merupakan hasil dari ide dan konstruksi sosial dari ide-ide tersebut.

Identitas nasional Korea Selatan yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan, khususnya *comfort women* dimulai pada akhir tahun 1980. Demokratisasi Korea Selatan memungkinkan media lebih kritis dalam menyuarakan situasi kolonial Jepang bersamaan dengan kampanye feminis untuk hak-hak perempuan. Kisah korban yang merebut perhatian masyarakat, para korban yang mulai berani memberikan kesaksian dan peneliti bersama dengan para aktivis yang mulai menyelidiki dan menuntut menjadi faktor bertumbuhnya identitas ini.

Identitas nasional Jepang yang dipegang dengan teguh oleh masyarakat Jepang dari dulu adalah rasa hormat yang tinggi kepada Kekaisaran Jepang. Ini menjadi alasan dimana Jepang lebih memilih menarik ulur masalah ini disbanding melakukan upaya sesuai dengan tuntutan para korban *comfort women*. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa Kaisar Jepang Hirohito yang berkuasa dari 1921 hingga 1989 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang memiliki tanggung jawab dalam dilaksanakannya praktik *comfort women*. Kebijakan Jepang yang terasa enggan dalam mengakui kesalahan dan bertanggung jawab dikarenakan apabila dilakukan secara resmi maka secara tidak langsung dan langsung akan menyatakan keterlibatan Kaisar Hirohito.

Dengan berbagai upaya telah dilakukan tetapi tetap gagal untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women*, pada tahun 2015 kedua negara membuat sebuah perjanjian bilateral. Bukannya

menjadi awal dari tiga implikasi yang membuat hubungan bilateral kedua negara semakin memburuk. Tiga implikasi tersebut adalah Perang Dagang Jepang-Korea Selatan 2019, *General Security of Military Information Agreement* dan pemboikotan produk Jepang.

Perang Dagang Jepang-Korea Selatan 2019

Perang Dagang dimulai pada 1 Juli 2019 dimana Jepang meningkatkan kontrol atas kegiatan ekspor tiga macam produk ke Korea Selatan, yaitu *fluorinated polyimide* yang digunakan untuk pembuatan layer ponsel, *photoresists* dan *hydrogen fluoride* yang digunakan dalam bahan pembuatan semikonduktor (Ma. A, 2019). Efek dari pembatasan ini adalah setiap eksportir harus mengajukan izin untuk mengekspor tiga bahan tersebut ke Korea Selatan dimana prosesnya memakan waktu 90 hari (Dolan.D, 2019).

Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Yasutoshi Nishimura mengakui bahwa langkah ini merupakan balasan dari pemerintah Jepang untuk keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada bulan Oktober 2018 (Agence France-Presse, 2019). Keputusan tersebut memerintahkan tiga perusahaan Jepang yang melakukan kerja paksa pada Perang Dunia II untuk memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa dari Korea Selatan, termasuk para korban *comfort women*. Permasalahan ini terus berkembang ketika Jepang menghapus Korea Selatan dari *whitelist* pada 2 Agustus 2019 (Sugihara. J, 2019). *Whitelist* merupakan daftar negara yang diberikan pembebasan prosedur ekspor tambahan untuk semua produk. Korea Selatan yang awalnya bagian dari Grup A, diturunkan menjadi Grup B.

Penghapusan ini kemudian dibalas oleh Koera Selatan yang menghapus Jepang dari daftar mitra dagang terpercaya, dengan alasan Jepang mengganggu rantai pemasokan global untuk perusahaan teknologi Korea

(Pham.S;Seo.Y,2019) Penghapusan ini membuat perusahaan yang mengekspor produk yang berhubungan dengan produksi senjata harus mengisi lebih banyak dokumen yang memakan waktu yang lama untuk disetujui dan izin ekspor yang lebih pendek. Jepang yang awalnya merupakan negara Grup A diturunkan menjadi negara Grup A-2.

Permasalahan terus memburuk hingga Korea Selatan mengajukan complain ke *World Trade Organization* (WTO) atas kontrol ekspor yang dilakukan oleh Jepang dengan tuduhan kontrol tersebut “bermotivasi politik” dan “diskriminatif” (Aljazeera, 2019). Sebagai langkah pertama penyelesaian sengketa, Korea Selatan harus mengajukan pertemuan dengan Jepang terlebih dahulu. Hingga 12 Oktober 2019, solusi masih belum ditemukan oleh kedua negara walaupun beberapa pertemuan bilateral telah dilakukan di kantor pusat WTO di Jenewa.

Dengan pembatasan ekspor, ekspor Jepang ke Korea Selatan telah menurun 8,1% dibandingkan tahun lalu. Perusahaan Jepang harus mengarahkan penjualan mereka ke negara lain, dimana sebelumnya Korea Selatan merupakan klien utamanya yang memberikan paling banyak pendapatan. Pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Jepang juga memberikan implikasi dimana akan terjadinya peningkatan perdagangan antara Korea Selatan dengan China. Selain itu, pembatasan ini menjadi dorongan untuk Korea Selatan menjadi lebih mandiri dalam produksi.

Menurut *Standard & Poor's Global ratings*, yang merupakan sebuah perusahaan penyedia data dan penelitian multi-aset, permasalahan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menurun yaitu 2% pada 2019 dan 2,6% pada 2020 (The Japan Times, 2019). Sedangkan Jepang akan mengalami penurunan yang

pada 2020. Korea Selatan harus mengalami penurunan pertumbuhan yang tinggi dikarenakan pengumuman anggaran tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemerintah akan menghabiskan 2,1 triliun won untuk memproduksi bahan dan suku cadangnya sendiri. Menurut *Korea Customs Service*, ekspor Korea Selatan juga menurun sejak bulan September 2019 sebesar 22% apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus menurun apabila perang dagang terus berlangsung.

Perang Dagang antara Jepang dan Korea Selatan merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan efek riak. Penyelesaian permasalahan *comfort women* semakin tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat jika dilihat dengan hubungan bilateral kedua negara yang semakin memburuk dalam merespon perang dagang ini. Selain mempengaruhi perekonomian kedua negara, permasalahan *comfort women* juga memberikan implikasi kepada keamanan nasional dengan penarikan Korea Selatan dari GSOMIA.

General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)

Pada November 2016, Korea Selatan menandatangani *General Security of Military Information Agreement* yang merupakan perjanjian bilateral yang telah dinegosiasikan sejak tahun 2011 dengan Jepang. Perjanjian ini memungkinkan untuk berbagi informasi intelijen antara kedua negara dengan fokus informasi sensitif mengenai perkembangan nuklir dan rudal yang memiliki klasifikasi kelas 2 atau lebih rendah milik Korea Utara.

Perjanjian ini memiliki tujuan yang penting, karena radar Korea Selatan tidak dapat mengamati saat rudal Korea Utara jatuh ke Laut Timur dekat Jepang sedangkan Jepang tidak memiliki informasi kapan rudal tersebut diluncurkan. Hingga pada tahun 2019, kedua negara telah melakukan pertukaran informasi militer sebanyak 20

kali, dimana pada tahun ini telah dilakukan sebanyak tujuh kali.

Setelah menghapus Jepang dan daftar mitra ekspor, Korea Selatan menyatakan akan mengundurkan diri dari GSOMIA. Perjanjian ini diperpanjang otomatis setiap tahun dan perjanjian ini akan *expired* 3 bulan setelah Korea Selatan menyatakan pengunduran diri yaitu 24 Agustus 2019. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan pengunduran diri dari GSOMIA dikarenakan Jepang telah membuat sebuah perubahan yang merugikan kerja sama keamanan antara kedua negara dengan menghapus Korea Selatan dari daftar putih mitra ekspor pilihan (Reiji Yoshida, 2012).

Wakil direktur kantor keamanan nasional *Blue House* Korea Selatan, Kim You-geun, menyatakan bahwa atas tindakan Jepang yang menghapus Korea Selatan dalam daftar mitra tersebut merupakan sebuah pelanggaran kepercayaan bilateral dan mempengaruhi kerja sama keamanan nasional antara dua negara (Park H.R; Lee. J, 2019).

GSOMIA bukan saja penting dalam keamanan nasional kedua negara, tetapi juga penting untuk Amerika Serikat. GSOMIA telah membantu Amerika Serikat dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan nuklir Korea Utara dalam *Trilateral Coordination and Oversight* (TCOG) antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Kerja sama trilateral antara ketiga negara telah berlangsung sejak tahun 1999, tetapi terdapat perkembangan yang signifikan setelah Perjanjian 2015 antara Jepang dan Korea Selatan dilaksanakan. Permasalahan *comfort women* merupakan sebuah penghalang besar dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara, yang kemudian diselesaikan dalam Perjanjian 2015.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Cha Jong-hwan menyatakan bahwa

perjanjian bilateral membentuk GSOMIA ini merupakan bentuk kepercayaan kedua negara dan Amerika Serikat untuk membagi informasi dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara (The Japan Times, 2016). Sebelum GSOMIA ini dibentuk, AS memiliki dua perjanjian bilateral mengenai pembagian informasi intelijen yang berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan. Informasi mengenai Korea Utara akan terlebih dahulu masuk ke AS sebelum mencapai sekutu lainnya. Informasi sensitif milik Jepang harus dihapus terlebih dahulu sebelum Amerika Serikat mengirimkan informasi tersebut ke Korea Utara (Bryan Wood, 2019). Proses keterlambatan ini yang akan merugikan dalam konflik *real-time* dengan Korea Utara. Dengan GSOMIA ini, pembagian informasi akan berlangsung lebih cepat dan *real-time*.

Tanpa informasi dari Korea Selatan, sulit untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang lintasan rudal balistik milik Korea Utara dan juga situasi politik di Korea Utara (Reiji Yoshida, 2012). Berakhirnya GSOMIA juga dianggap sebuah potensi untuk Korea Utara dan negara lain yang menginginkan aliansi AS semakin lemah, menurut Mira Rapp-Hooper yang merupakan seorang peneliti senior untuk *Council on Foreign Relations* dan *Yale Law School*.

Penarikan Korea Selatan dari GSOMIA membahayakan keamanan regional Asia Pasifik dan keamanan nasional AS dengan persenjataan nuklir dan balistik Korea Utara yang berkembang pesat beberapa waktu terakhir. Perang dagang antara kedua negara dan penarikan diri Korea Selatan dari GSOMIA merupakan masalah yang berhubungan kuat dan menjadi hasil dari permasalahan *comfort women*. Bukan hanya respon pemerintah, masyarakat Korea Selatan juga memberikan respon atas ketidaksetujuan dalam proses penyelesaian permasalahan *comfort women*.

Pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan

Sebagai respon masyarakat atas ketidaksetujuan dengan pembatasan ekspor yang menyebabkan perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan, masyarakat Korea Selatan memulai gerakan yang memboikot penggunaan produk-produk dari Jepang secara nasional dengan nama gerakan “No Japan”. Boikot ini menjadi populer dengan slogan “I Will Not Buy, I Will Not Go, and I Will Not Wear”. Hampir semua produk Jepang yang dipasarkan dengan bebas di Korea Selatan menjadi target pemboikotan. Kampanye “No Japan” dilakukan melalui aplikasi seluler dan situs internet yang menunjukkan produk dan merek Jepang, beserta alternatif produk buatan Korea Selatan (Kelly Kasulis, 2019). Pemboikotan telah dimulai dari 1 Juli 2019, tepatnya ketika Jepang menyatakan pembatasan ekspor untuk Korea Selatan.

Dalam berita *The Korean Times*, pompa bensin dan bengkel di Korea Selatan diminta oleh warga untuk berhenti menyediakan layanan untuk mobil yang dibuat oleh Jepang (Ka Dong-hwa, 2019). Penjualan mobil buatan Jepang juga menurun, seperti Toyota yang menurun 69% dan Honda sebanyak 81% dibandingkan tahun lalu. Masyarakat Korea Selatan yang melakukan kunjungan liburan ke Jepang juga semakin berkurang berdasarkan pernyataan dari berbagai penyedia tur liburan besar di Korea Selatan, seperti Hana Tour dan Mode Tour. Hana Tour sejak Juli 2018, hanya menerima 500 reservasi baru perjalanan ke Jepang setiap hari, dimana tahun lalu setiap harinya terdapat 1.200 reservasi baru (Shin Min-jung, 2019). Sedangkan Mode Tour mengumumkan bahwa jumlah pemesanan baru dari 1 sampai 18 Juli menurun 70% dan kenaikan 50% pembatalan perjalan liburan.

Selain mobil dan kunjungan liburan, bir buatan Jepang juga mengalami penurunan penjualan. Sebagaimana dilaporkan oleh

terbesar di Korea Selatan, terjadi penurunan sebanyak 30,1% untuk penjualan bir buatan Jepang. Pada 30 Oktober 2019, dinyatakan oleh Kementerian Perdagangan Jepang bahwa penjualan bir buatan Jepang di Korea Selatan telah menurun sebanyak 99,9% (Channel News Asia, 2019).

Salah satu merek pakaian terkenal dari Jepang, Uniqlo, juga menjadi target dari boikot ‘No Japan’. Penjualan Uniqlo di Korea Selatan menurun sebanyak 40% dibandingkan sebelum boikot ini dilakukan (Kim Da-sol, 2019). Dari Juli, empat toko Uniqlo telah ditutup di Korea Selatan.

Dunia perfilman Jepang juga mendapatkan efek dari pemboikotan produk. Beberapa film animasi buatan Jepang yang tayang pada bulan Juli 2019 seperti “Butt Detective the Movie”, “Detective Conan: The Fist of Blue Shapphire” dan “Doraemon: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration” mendapatkan review yang buruk dari masyarakat Korea Selatan dengan alasan bahwa masyarakat Korea Selatan tidak boleh menonton film buatan Jepang. Selain ulasan yang buruk, penonton film animasi tersebut juga turun drastis jika dibandingkan film animasi yang keluar sebelum pembatasan ekspor dilakukan oleh Jepang.

Tindakan pemboikotan ini dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan yang tidak setuju dengan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Jepang. Pemboikotan ini sendiri telah dilakukan lama oleh masyarakat sebagai bentuk dari sentimen anti-Jepang, tetapi pemboikotan menjadi terkenal dan dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat setelah Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar mitra dan melakukan pembatasan ekspor. Bukan hanya antar pemerintah, permasalahan ini telah memberikan implikasi hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat Korea Selatan. Mereka memilih untuk memboikot berbagai barang buatan Jepang, seperti bir, pakaian, mobil, film dan

kunjungan liburan, yang kemudian mempengaruhi perekonomian Jepang.

Kesimpulan

Permasalahan *comfort women* telah memberikan implikasi yang kuat dalam perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Penulis menemukan implikasi tersebut adalah perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2019, penarikan Korea Selatan dari General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) dan pemboikotan produk Jepang yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan.

Hubungan bilateral antara kedua negara yang selama ini tidak terlalu harmonis, semakin memburuk ketika Mahkamah Agung Korea Selatan menuntut tiga perusahaan Jepang harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang selama ini dipaksa kerja pada Perang Dunia 2. Apabila tuntutan ini dilaksanakan, maka akan membuka peluang pemerintah Jepang untuk menghabiskan banyak dana untuk diberikan kepada korban Perang Dunia 2, termasuk para wanita yang menjadi korban *comfort women*.

Sebagai respon dari tuntutan tersebut, Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar mitra dan melakukan pembatasan ekspor, yang kemudian dibalas Korea Selatan dengan manghapus Jepang dari daftar mitra ekspornya juga. Perang dagang antara kedua negara telah memberikan efek yang buruk kepada perekonomian kedua negara, dimana ekspor Jepang ke Korea Selatan yang menurun 8,1% dan kemungkinan berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebanyak 2%. Penarikan Korea Selatan dari

GSOMIA sebagai implikasi yang kedua menjadi ancaman kepada keamanan nasional kedua negara, dimana perjanjian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan *real-time* mengenai perkembangan nuklir dan rudal Korea Utara.

Bukan hanya antar pemerintah, implikasi juga dirasakan dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan yang melakukan boikot produk-produk buatan Jepang, seperti bir, mobil, pakaian, tur liburan hingga film. Pemboikotan ini diperparah dengan meningkatnya sentimen anti-Jepang di kalangan masyarakat Korea Selatan yang berujung kepada penurunan penjualan produk Jepang di Korea Selatan.

Permasalahan *comfort women* yang terjadi sejak tahun 1932 tidak kunjung mencapai kesepakatan antara Jepang dan Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang mendasar tentang pemahaman *comfort women* antara kedua negara. Pemahaman budaya Jepang mengenai *comfort women* diawali dengan melihat para wanita tersebut sebagai duta budaya atau biasa disebut dengan geisha, yang kemudian berkembang seiringan Perang Dunia 2 dan pembentukan *comfort stations*. Sebaliknya, pemahaman Korea Selatan melihat bahwa masalah ini merupakan sebuah pelanggaran HAM dimana wanita tersebut dijadikan sebagai budak seks. Penanganan masalah yang terus gagal justru semakin memperburuk hubungan bilateral kedua negara hingga sekarang. Apabila permasalahan ini tidak ditangani secepatnya, maka akan ada implikasi-implikasi lainnya yang muncul di masa depan.

Daftar Pustaka

- Agence France-Presse. (2019, 1 July). Japan moves to curb exports to South Korean tech firms, in escalation of forced labour row. *South China Morning Post*. Retrieved from <https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3016756/japan-hits-back-south-korea-forced-labour-row-tightening-rules>
- Aljazeera. (2019, 11 September). *South Korea will lodge WTO complaint over Japan's export curbs*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/ajimpact/south-korea-lodge-wto-complaint-japan-export-curbs-190911012142836.html>
- Asian Boss. (2018, 28 October). *Life as a "Comfort Woman": Story of Kim Bok-dong*". Video File. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=qsT97ax_Xb0
- Coomaraswamy, R. (1996). Report on the mission to the Democratic People's Republic of Korea, the Republic of Korea and Japan on the issue of military sexual slavery in wartime. *United Nations; Economic and Social Council; Commission on Human Rights*. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/228137>
- Channel News Asia. (2019). Japan beer exports to South Korea down 99.9% over boycott. *CNA*. Retrieved from <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/japan-beer-exports-to-south-korea-down-99-9-over-boycott-12046996>
- Digital Museum the Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund. (N.d.). How did the Comfort Women Issue come to light? *Asian Women's Fund*. Retrieved from <http://www.awf.or.jp/e2/survey.html>
- Dolan, D. (2019, 2 July). *Factbox: The high-tech materials at the heart of a Japan-South Korea row*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-laborers-factbox/factbox-the-high-tech-materials-at-the-heart-of-a-japan-south-korea-row-idUSKCN1TX12I>
- Etsuro, T. (2013). Proposals for Japan and the ROK to resolve the "comfort women" issue: creating trust and peace in light of international law. *The Asia-Pacific Journal*, 11(1), 3.
- International Commission of Jurist. (1994, 1 December). Comfort Women: An unfinished ordeal – Report of a Mission. Retrieved from <https://www.icj.org/comfort-women-an-unfinished-ordeal-report-of-a-mission/>
- The Japan Times. (2016, 28 October). *South Korea, Japan to resume talks on military information-sharing pact*. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/28/national/south-korea-japan-resume-talks-military-information-sharing-pact-2/#.XZxlCuczZmD>
- The Japan Times. (2019, 28 September). *Economist warns on larger ripple effect of Japan-South Korea trade war*. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/28/business/economist-warns-larger-ripple-effect-japan-south-korea-trade-war/#.XZhRQeczZmA>
- Jemadu, A. (2017). *Politik global; dalam teori dan praktik* (3rd ed.). Yogyakarta, Indonesia: Suluh Media.
- Jonsson, G. (2015). Can the Japan-Korea dispute on "Comfort Women" Be Resolved? *Korea Observer*, 46(3), 5.
- Kasulis, K. (2019, 12 August). *South Korea's 'No Japan' boycott is new. But the wounds are old*. Retrieved from <https://www.pri.org/stories/2019-08-12/south-korea-s-no-japan-boycott-new-wounds-are-old>

- Kim, D. S. (2019, 6 October). *Uniqlo records 40 percent drop in sales, closes its Jongno 3-ga store*. Retrieved from <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190802000462>
- Ko, D. H. (2019, 23 July). Anti-Japanese car movement sparks backlash. *Korea Times*. Retrieved from http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/07/419_272758.html
- Kun, Y. (2015). National interest or transnational alliances? Japanese policy on the comfort women issue. *Journal of East Asian Studies*, 15(2), 243-269. <https://doi.org/10.1017/S159824080000936X>
- Lee, S. R. (2014). Comforting the comfort women: Who can make Japan pay? *Penn Law: Legal Scholarship Repository*, (24), 2.
- Ma, A. (2019). *South Korea and Japan are having their own trade war*. Retrieved from <https://www.businessinsider.sg/south-korea-japan-trade-war-gas-stations-decades-long-tensions-2019-7/?r=US&IRT>
- McDougall, G. J. (1998). Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict. *United Nations Economic and Social Council*, 41.
- McCurry, J. (2019, 4 September). South Korean boycott of Japanese goods hits beer and carmakers. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/04/south-korea-boycott-japanese-goods-beer-car-sales>
- Ministry Foreign Affairs of Japan (2015). *Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion*. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1993). *Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of “comfort women”*. Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html>
- Park, H. R., & Lee, J. (2019, 23 August). Korea to scrap military intelligence-sharing with Japan. *Korea.net*. Retrieved from <http://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=174503>
- Pham, S., & Seo, Y. (2019, 12 August). South Korea downgrades trade ties with Japan. *CNN*. Retrieved from <https://edition.cnn.com/2019/08/12/business/south-korea-japan-trade-war/index.html>
- Shin, M. J., & Yu S. H. (2019, 22 July). S. Koreans boycott Japan campaign spreading to culture and travel. *Hankyoreh*. Retrieved from http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/902861.html
- Sugihara, J. (2019). Japan officially ousts South Korea from export whitelist. *Nikkei Asian Review*. Retrieved from <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-South-Korea-rift/Japan-officially-ousts-South-Korea-from-export-whitelist>
- United Nations Human Rights Bodies. (2013). *Complication of Recommendations by the UN Human Rights Bodies on the “Comfort Women” Issue*. Geneva, Switzerland: United Nations.
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Boston, MA: Pearson Allyn and Bacon.
- Wood, B. (2019, 20 August). How a Japan-South Korea dispute ended a key intelligence pact. *PBS*. Retrieved from <https://www.pbs.org/newshour/world/how-a-japan-south-korea-dispute-could-threaten-this-u-s-intelligence-pact>

Verity – UPH Journal of International Relations
Faculty of Social and Political Science
Pelita Harapan University

Yoshida, R. (2012). Formed in childhood, roots of Abe's conservatism go deep. *Japan Times*. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/news/2012/12/26/national/formed-in-childhood-roots-of-abes-conservatism-go-deep/#.Xhc6whczZQI>